Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas
Objek Pajak Pada Boedel Pailit Ditinjau Dari Asas Keadilan Pajak dan Prinsip Paritas Creditorum Studi Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk
FANY RAHMASARI, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg perihal pembatalan perdamaian dan pernyataan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk beserta entitas anak usahanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas
Objek Pajak Pada Boedel Pailit Ditinjau Dari Asas Keadilan Pajak dan Prinsip Paritas Creditorum Studi Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk
FANY RAHMASARI, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Huda, Nurul. *Kilas Balik Implementasi Pengalihan Pajak PBB-P2 di Daerah*. Guepedia, 2021.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Mulyanti, Dewi, Firman Nugraha, dan Hendi Budiaman. *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: Cipta Media Nusantara.

Nainggolan, Bernard. *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.

Rajagukguk, Ronald Hasudungan, dan Agus Tina. *Perpajakan Indonesia*. Medan: PUBLIS Penerbit UNPRI Press, 2025.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Wibowo, Agus. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Wulandari, P. A., dan E. Iryanie. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Afifulloh, A., T. A. SN, dan S. Hadiyantina. "Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas
Objek Pajak Pada Boedel Pailit Ditinjau Dari Asas Keadilan Pajak dan Prinsip Paritas Creditorum Studi Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk
FANY RAHMASARI, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah." *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata)* 2, no. 2 (2023): 97–111.

Adiono, Yosep Bayu. "Kedudukan Negara sebagai Kreditor atas Utang Pajak dan Pinjaman Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 10, no. 1 (2026): 21–31.

Albab, Ulil, dan Sudaryat Elisatris Gultom. "Paradoks Pelindungan Kreditor Konkuren dalam Skema Kepailitan dan PKPU di Indonesia: Analisis Komparatif dan Perspektif Keadilan Distribusi." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 3 (2025): 3717–3725.

Anfal, S., I. Rahmawati, K. Kasjana, I. Ibrahim, dan S. F. WN. "Hukum Pajak: Penggolongan Pajak dan Peranannya bagi Negara." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 1 (2026): 127–137.

Faisal, Fedhli. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditor Separatis dalam Perkara Kepailitan." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 327–338.

Firmansyah, Raden Rizki Agung, dan I Dewa Nyoman Sekar. "Pengaturan dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium dalam Hukum Kepailitan di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (2014).

Gotama, Alexandra Weendra Puspa, Ainola Shaliha Lasut, dan Fiona Louysa Rondo. "Urgensi Keadilan Pemungutan Pajak: Analisis Relasi Negara dan Wajib Pajak." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 813–820.

Hartini, O., dan D. Sopian. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)* 10, no. 2 (2018): 43–56.

Hermawan, Muhammad Bayu. "Pengaturan Hukum terhadap Hak Kreditur Konkuren yang Dirugikan dalam Rangka Penegakan Hukum yang Transparan dan Berkeadilan." *IBLAM Law Review* 5, no. 3 (2025): 66–76.

Hindrawan, Prayogo, et al. "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 720–732.

Ilra, Amirah Shabrina, dan Marsya Aprilya. "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025): 11138–11152.

Lingga, Win Salamsyah, Maryano, dan Marni Emmy Mustofa. "Pelindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren atas Harta Pailit Debitor yang Disita Pidana." *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 898–911.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas
Objek Pajak Pada Boedel Pailit Ditinjau Dari Asas Keadilan Pajak dan Prinsip Paritas Creditorum Studi Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk
FANY RAHMASARI, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mou, G. E. "Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan." *Borneo Law Review* 2, no. 2 (2018): 183–200.

Muryati, Dewi Tuti, Dhian Septiandani, dan Efy Yulistyowati. "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (2017): 11–21.

Murtadho, Nazhif Ali. "Pelindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2024): 207–226.

Najma, Siti Najla Nur, et al. "Konflik Kepentingan dalam Hak Kebendaan di atas Benda Milik Orang Lain: Antara Pelindungan Pemilik dan Hak Preferensi Kreditor." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025).

Novianto, R. W., R. D. P. Ramadhan, S. F. Azzahra, dan F. Irawan. "Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan." *Jurnalku* 3, no. 2 (2023): 187–195.

Nurhayati, T., dan T. Taun. "Analisis Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelapan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 3923–3933.

Prastowo, Yustinus. "Kerangka Filosofis bagi Paradigma Baru Kebijakan Pajak." *Majalah Pajak* 16 (2015): 1–12.

Puspa, Asvini, dan Firman Darajat. "Penyempurnaan Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Tagihan Pajak pada Proses Kepailitan." *Mimbar Hukum* 35 (Special Issue) (2023).

Samosir, Hotmian Helena. "Upaya Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak (Badan) yang Diputuskan Pailit." *Kajian Akademis BPPK* (2024): 185–206.

Siburian, Ruth Yohana, Etty Susilowati, dan Budi Ispriyarso. "Tanggung Jawab Kurator terhadap Pemenuhan Hak Negara atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–17.

Suasa, Made Dwi Surya, I. Made Arjaya, dan I. Putu Gede Seputra. "Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 6–10.

Waruwu, Eliezer. "Kontradiksi Pelindungan Hukum Kreditor Separatis dengan Prinsip *Paritas Creditorum* dalam Pelaksanaan Kepailitan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 10 (2025): 2376–2386.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas
Objek Pajak Pada Boedel Pailit Ditinjau Dari Asas Keadilan Pajak dan Prinsip Paritas Creditorum Studi Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk
FANY RAHMASARI, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Yuliastuti, Eko, dan Gita Ayu Galuh Palupi. "Analisis Yuridis terhadap Utang Pajak Perseroan Terbatas yang Mengalami Kepailitan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Ardiansyah, Restoe Sheva. "Prinsip Efisiensi terhadap Hak Mendahulu Negara atas Piutang Pajak dalam Kepailitan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Artikel Media Online

Handayani, Ruruh. "Tagihan PBB PT Sritex Capai Rp 1 M, Pemkab Sukoharjo Tetap Lakukan Penagihan Meski Pabrik Tutup." Pajak.com, 2025. https://www.pajak.com/pajak/tagihan-pbb-pt-sritex-capai-rp-1-m-pemkab-sukoharjo-tetap-lakukan-penagihan-meski-pabrik-tutup/.

Hayat, Wiji Nur. "Sritex Pailit, Nasibnya Dipegang 4 Orang Ini". CNBC Indonesia, 3 November 2024. https://www.cnbcindonesia.com/news/20241102212635-4-585150/sritex-pailit-nasibnya-dipegang-4-orang-ini (diakses 20 Juli 2026).

Ibadi, Wahyu Imam. "Termasuk PT Sritex, BPKPAD Sukoharjo Kejar Pelunasan Piutang PBB." KRJogja, 8 Januari 2026. https://www.krjogja.com/klaten/1247043578/termasuk-pt-sritex-bpkpad-sukoharjo-kejar-pelunasan-pbb.

Kompas.com. "Tim Kurator Sritex Kebut Lelang Aset untuk Pembayaran Pesangon Eks Buruh". Kompas.com, 31 Januari 2026. https://regional.kompas.com/read/2026/01/31/204244478/tim-kurator-sritex-kebut-lelang-aset-untuk-pembayaran-pesangon-eks-buruh (diakses 20 Juli 2026).

Tempo. "Kurator Sritex Lelang Aset, soal Pesangon Tunggu Hasil". Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/kurator-sritex-lelang-aset-soal-pesangon-tunggu-hasil-2111629 (diakses 20 Juli 2026).

Putra, Agil Trisetiawan. "Eks Pabrik PT Sritex di Sukoharjo Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar." Detik, 2025. https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-8113249/eks-pabrik-pt-sritex-di-sukoharjo-nunggak-pbb-rp-1-1-miliar.

Ully, Dien. "Tunggakan PBB PT Sritex Capai Rp 1,1 Miliar Usai Pailit." Rekam Jejak Post, 22 September 2025. https://rekamjejakpost.com/tunggakan-pbb-pt-sritex-capai-rp-11-miliar-usai-pailit/.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Objek Pajak Pada Boedel Pailit Ditinjau Dari Asas Keadilan Pajak dan Prinsip Paritas Creditorum Studi Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk
FANY RAHMASARI, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wicaksono, R. Bony Eko. "Kejar Target, BPKPAD Sukoharjo Genjot Pembayaran PBB." Solopos, 2025. https://solopos.espos.id/kejar-target-bpkpad-sukoharjo-genjot-pembayaran-pbb-2143687.